

Abstrak

Penelitian ini berjudul Tanggung gugat Notaris terhadap pekerja Notaris yang tidak diikuti sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penulis memilih judul ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa Notaris sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial karena hal itu merupakan kebutuhan mendasar dan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yakni : *statute approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam menyusun data dan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode deduksi yaitu metode penyelidikan didasarkan pada asas-asas yang bersifat umum untuk menerangkan peristiwa yang bersifat khusus atau dari teori yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja Notaris yang tidak didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Notaris, serta mengetahui dan menganalisis mengenai sanksi bagi Notaris yang tidak mengikut sertakan pekerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja Notaris yang tidak didaftarkan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Notaris, yaitu dengan membuat pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai domisili kantor Notaris berada. Hal ini telah diatur didalam pasal 70 huruf g UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap kode etik ataupun pelanggaran terhadap Undang-undang. Selanjutnya oleh Majelis Pengawas Daerah laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. (2) Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat organisasi Notaris. Hal tersebut sesuai dengan pasal 76-77 UUJN yang mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas Pusat. Dalam kasus ini Notaris dapat dikenai sanksi pelanggaran kode etik profesi karena terbukti melanggar Undang-Undang BPJS dengan tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan sosial.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, , BPJS, Pekerja Notaris.

Abstract

This research is titled The Deed of Notary of notary employees who is not included as a participant in the Social Security organizer of Health and Manpower Social Security administering Agency. The author chooses this title Intended to provide explanation that the notary public employer Obligation to include their employees in the Social Security program Because it is a fundamental necessity and a protected human right by the Act.

The research methods used in answering the legal issues raised In this study using a normative juridical legal research method, with 3 (three) approaches: statute approach, conceptual approach and case approach. The source of research materials used in the writing of this thesis is Primary law and secondary legal materials. Methods of analysis used in Drafting data and research on the writing of this thesis is the deduction method that is Methods of inquiry are based on common principles for Describing special events or from common theories of concrete facts.

This research aims to know and analyse the effort so Law that a notary worker can do that is not registered as a participant The Social Security administering Agency by notary, as well as knowing and analyzing of sanctions which do not include workers in the program Social Security Administering agency The results showed that: (1) legal remedies that can be done by a notary worker who is not registered as a participant of the Coordinating Board Social Security by notary, by making a complaint addressed to the The regional supervisory panel is based onnotary office. It is set In article 70 g of UUJN stating that the regional supervisory Tribunal Authorized to accept reports of alleged violations of the code of Ethics or Violation of the Act. Further by the Regional Supervisory Council There port is submitted to the Regional supervisory assembly. (2) sanctions a notary public who does not register his employees in BPJS program. Is a decision issued by the Central Supervisory Assembly Notary. It complies witharticle76-77 of the UUJN governing the Authority of the central Supervisory Assembly. In this case the notary may be subject to Violation of profession code of ethics because it proved to violate BPJS law not registering their employees in the Social Security program.

Keywords : Social Guarantee, BPJS, Notary Worker.